

LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2020

**Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020**

AUDITED



Jl. Jenderal Sudirman No. 81 A, Krobokan, Kota Semarang

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Semarang, 31 Desember 2020
Kepala Balai,



Ir. Parlin Robert Sitanggang
NIP. 196412281992031002

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pernyataan Tanggung Jawab	5
Ringkasan	6
I Laporan Realisasi Anggaran	8
II Neraca	9
III Laporan Operasional.....	10
IV Laporan Perubahan Ekuitas.....	11
V Catatan atas Laporan Keuangan	12
A Penjelasan Umum.....	12
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	21
B.2 Belanja.....	22
B.2.1 Belanja Pegawai	23
B.2.2 Belanja Barang.....	24
B.2.3 Belanja Modal.....	25
B. 2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1 Aset Lancar.....	26
C.1.1 Kas Bendahara Pengeluaran	26
C.1.2 Kas Bendahara Penerimaan	26
C.1.3 Piutang Bukan Pajak.....	26
C.1.3 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak.....	27
C.1.4 Persediaan.....	27
C.2 Aset Tetap	28
C.2.1 Tanah	28
C.2.2 Peralatan Mesin	28
C.2.3 Gedung Bangunan.....	29
C.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	29
C.2.5 Aset Tetap Lainnya	29
C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	29
C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	30

C.4	Kewajiban Jangka Pendek.....	30
C.4.1	Utang kepada Pihak Ketiga.....	30
C.5	Ekuitas.....	31
D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	32
D.2	Beban Pegawai.....	33
D.3	Beban Persediaan	33
D.4	Beban Barang dan Jasa.....	33
D.5	Beban Pemeliharaan	34
D.6	Beban Perjalanan Dinas	35
D.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	36
D.8	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	36
D.9	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	36
E.1	Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
E.2	Surplus/Defisit-LO	38
E.3	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/ Kesalahan Mendasar.....	38
E.3.1	Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi.....	38
E.4.1	Diterima Dari Entitas Lain(DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain(DKEL)...	39
E.4.2	Transfer Masuk/Transfer Keluar.....	39
E.5	Ekuitas Akhir.....	39
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	40
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	40
F.2	Pengungkapan Lain-lain	



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN KARANTINA PERTANIAN
BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG

JALAN M. PARDI NOMOR 7 KOMPLEK PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG 50174
TELEPON : (024) 3547915 , FAKSIMILI : (024) 3566315
WEBSITE : semarang.karantina.pertanian.go.id
E-MAIL : karantinasemarang@pertanian.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 31 Desember 2020
Kepala Balai,



Jr. Parlin Robert Sitanggang
NIP. 196412281992031002



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11,831,929,970.00 atau mencapai 119.75% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp9,880,800,000.00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp21,791,606,552.00 atau mencapai 99.93% dari alokasi anggaran sebesar Rp21,806,594,000.00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp79,517,295,909.00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp764,009,780.00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp78,701,128,849.00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0.00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp52,157,280.00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp61,354,477.00 dan Rp79,455,941,432.00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11,723,503,637.00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp19,005,027,646.00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-7,281,524,009.00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp107,514,029.00 dan Defisit Rp0.00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7,174,009,980.00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp76,080,526,927.00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-7,174,009,980.00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp-97,863,065.00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp10,046,442,582.00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp78,855,096,464.00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020			31 Desember 2019
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	9,880,800,000.00	11,831,929,970.00	119.75	13,807,033,370.00
Jumlah Pendapatan		9,880,800,000.00	11,831,929,970.00	119.75	13,807,033,370.00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	7,995,241,000.00	7,989,356,480.00	99.93	7,743,032,097.00
Belanja Barang	B.4.	9,509,953,000.00	9,501,511,072.00	99.91	10,518,458,580.00
Belanja Modal	B.5.	4,301,400,000.00	4,300,739,000.00	99.98	12,430,294,290.00
Jumlah Belanja		21,806,594,000.00	21,791,606,552.00	99.93	30,691,784,967.00

II. NERACA

BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
ASET			
Aset Lancar			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.	0.00	669,000.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	0.00	-3,345.00
Persediaan	C.1.3.	764,009,780.00	742,947,884.00
Jumlah Aset Lancar		764,009,780.00	743,613,539.00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	51,051,513,680.00	51,051,513,680.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	8,953,784,309.00	10,599,419,172.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	25,427,458,473.00	22,354,734,475.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	0.00	5,050,000.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5.	0.00	45,954,000.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-7,332,472,581.00	-8,665,931,532.00
Jumlah Aset Tetap		78,100,283,881.00	75,390,739,795.00
Aset Lainnya			
Aset Lain-lain	C.3.1.	2,358,158,363.00	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	-2,306,001,083.00	0.00
Jumlah Aset Lainnya		52,157,280.00	0.00
Jumlah Aset		78,916,450,941.00	76,134,353,334.00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	61,354,477.00	53,826,407.00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		61,354,477.00	53,826,407.00
Jumlah Kewajiban		61,354,477.00	53,826,407.00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	78,855,096,464.00	76,080,526,927.00
Jumlah Ekuitas		78,855,096,464.00	76,080,526,927.00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		78,916,450,941.00	76,134,353,334.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	11,723,503,637.00	13,715,168,641.00
JUMLAH PENDAPATAN		11,723,503,637.00	13,715,168,641.00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	7,989,356,480.00	7,742,644,217.00
Beban Persediaan	D.3.	674,417,550.00	566,989,350.00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4,300,540,115.00	4,110,164,433.00
Beban Pemeliharaan	D.5.	1,429,798,472.00	1,279,919,979.00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	3,135,405,305.00	4,322,160,235.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1,475,513,069.00	1,201,377,416.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8.	-3,345.00	2,185.00
JUMLAH BEBAN		19,005,027,646.00	19,223,257,815.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-7,281,524,009.00	-5,508,089,174.00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	107,757,333.00	92,300,875.00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.9.	0.00	2,221,257.00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	10,105,300.00	13,218,784.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9.	10,348,604.00	54,775,615.00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		107,514,029.00	48,522,787.00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-7,174,009,980.00	-5,459,566,387.00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 dan 31 DESEMBER 2019**

Uraian	Catatan	31 Desember 2020	31 Desember 2019
EKUITAS AWAL	E.1.	76,080,526,927.00	64,600,219,122.00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-7,174,009,980.00	-5,459,566,387.00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	-97,863,065.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.1.	-42,401,000.00	0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.2.	-55,462,065.00	0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	10,046,442,582.00	16,939,874,192.00
EKUITAS AKHIR	E.5.	78,855,096,464.00	76,080,526,927.00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang

Pembangunan perkarantinaan ditempatkan pada upaya melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati. Terkait dengan upaya ini maka peranan karantina meliputi aspek pengamanan pelestarian sumber daya hayati, pencegahan masuk/tersebarnya HPHK/OPTK, kelestarian lingkungan, dan keamanan pangan yang sehat, utuh, dan halal.

Dalam perdagangan bebas, persyaratan tarif bea masuk dan kuota menjadi tidak populer lagi digunakan untuk menahan laju impor, oleh karena itu persyaratan non tarif dan SPS digunakan sebagai instrumen perdagangan untuk mencegah devisa ekspor dan impor suatu negara. Oleh karena itu, Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian selaku Institusi Pemerintah yang menjalankan fungsi SPS atau Perkarantinaan Pertanian di Indonesia harus selalu melakukan upaya perbaikan dan penguatan di bidang perkarantinaan di Indonesia seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, tingginya frekuensi lalu lintas Komoditas Pertanian yang membawa konsekuensi semakin tingginya risiko masuk dan tersebarnya Hama dan penyakit hewan maupun tumbuhan. Dalam rangka peningkatan daya saing dan dukungan ekspor komoditas pertanian, Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian membantu para pelaku usaha pertanian dalam pemenuhan persyaratan teknis Sanitary and Phytosanitary (SPS) yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

Dalam upaya perbaikan dan penguatan di bidang perkarantinaan di Indonesia, Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian senantiasa melakukan pembenahan secara internal (lingkup Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian) maupun eksternal (kerja sama dengan instansi terkait baik secara nasional maupun internasional) dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi. Pembenahan-pembenahan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas nasional dan rencana strategis Kementerian Pertanian yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis yang didukung oleh Badan Karantina Pertanian khususnya Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian.

Sasaran program dan indikator kinerja sasaran program Badan karantina Pertanian yang didukung Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian yaitu: Aman dari ancaman OPTK/ HPHK dan Keamanan Hayati, Peningkatan daya saing Komoditas Pertanian, Tindakan Karantina, Pengawasan dan Pengendalian yang efektif dan efisien dengan indikator yaitu Rasio tindak lanjut terhadap temuan OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan, Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati nabati di tempat pemasukan, Rasio tindak lanjut terhadap temuan ketidak sesuaian terhadap pemenuhan persyaratan keamanan hayati hewani di tempat pemasukan, Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan,

Rasio komoditas ekspor pertanian yang ditolak negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang disertifikasi melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, Rasio komoditas pertanian yang sesuai dengan persyaratan karantina negara tujuan terhadap total komoditas ekspor pertanian yang diperiksa melalui tempat pengeluaran yang ditetapkan, Rasio kasus pelanggaran perkarantinaan yang diselesaikan terhadap total kasus komoditas pertanian, Nilai Reformasi Birokrasi Badan Karantina Pertanian, Nilai Kinerja Anggaran Badan Karantina Pertanian.

Untuk mewujudkan kinerja yang optimal dan tercapainya sasaran tersebut di atas, maka diperlukan iklim kondusif bagi pelaksanaan kegiatan perkarantinaan Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian. Namun demikian, kinerja tidak mungkin dicapai secara optimal tanpa dukungan dan koordinasi sinergis antara Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian, Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian, instansi terkait, institusi-institusi internasional, pengguna jasa karantina serta masyarakat.

A. 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian kedudukan, tugas dan Fungsi Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

2. Tugas

Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan operasional karantina;
- b. Pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati;
- c. Pemberian pelayanan sarana teknik karantina;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi karantina;
- e. Pelaksanaan administrasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

A.3. Visi dan Misi

Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian memberikan dukungan terhadap visi Presiden dan Kementerian melalui komitmen untuk “Menjadi Instansi yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan, Tumbuhan dan Keanekaragaman Hayati, Keamanan Pangan”.

Profesional, diartikan bahwa petugas karantina harus memiliki kemampuan, ketrampilan, keahlian serta integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

Tanggung diartikan bahwa sebagai benteng terdepan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang Badan Karantina Pertanian harus mampu melindungi pertanian Indonesia dari ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, OPTK serta Keamanan Hayati dengan menerapkan peraturan karantina secara tegas dan konsisten.

Terpercaya diartikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan karantina perlu mendapatkan kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan keamanan hayati.

Dukungan terhadap misi Presiden dan Kementerian Pertanian yaitu:

- a. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari tumbuhan dari serangan Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
- b. Mendukung terwujudnya keamanan pangan;
- c. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas pertanian;
- d. Memperkuat kemitraan perkarantinaan;
- e. Meningkatkan citra dan kualitas layanan public.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00
Pendapatan Jasa Lainnya	1,380,800,000.00	1,380,800,000.00
Jumlah Pendapatan	9,880,800,000.00	9,880,800,000.00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7,077,891,000.00	7,832,459,000.00
Belanja Lembur	338,350,000.00	162,782,000.00
Belanja Barang Operasional	1,919,814,000.00	2,193,211,000.00
Belanja Barang Non Operasional	490,380,000.00	514,633,000.00
Belanja Barang Persediaan	844,410,000.00	643,850,000.00
Belanja Jasa	2,396,645,000.00	1,591,042,000.00
Belanja Pemeliharaan	1,028,200,000.00	1,429,880,000.00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	4,206,680,000.00	3,137,337,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156,500,000.00	1,089,900,000.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,272,500,000.00	3,211,500,000.00
Jumlah Belanja	21,731,370,000.00	21,806,594,000.00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11,831,929,970.00 atau mencapai 119.75% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp9,880,800,000.00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0.00	107,757,333.00	0.00
Pendapatan Jasa Lainnya	1,380,800,000.00	1,443,810,000.00	104.56

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	8,500,000,000.00	10,280,362,637.00	120.95
Jumlah	9,880,800,000.00	11,831,929,970.00	119.75

Realisasi Pendapatan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -14.31% dibandingkan TA 2019. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	107,757,333.00	92,300,875.00	16.75
Pendapatan Jasa Lainnya	1,443,810,000.00	2,485,990,000.00	-41.92
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	10,280,362,637.00	11,228,741,661.00	-8.45
Pendapatan Lain-lain	0.00	834.00	100.00
Jumlah	11,831,929,970.00	13,807,033,370.00	-14.31

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 adalah sebesar Rp21,791,606,552.00 atau 99.93% dari anggaran belanja sebesar Rp21,806,594,000.00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	7,995,241,000.00	7,989,726,905.00	99.93
Belanja Barang	9,509,953,000.00	9,501,511,072.00	99.91
Belanja Modal	4,301,400,000.00	4,300,739,000.00	99.98
Total Belanja Kotor	21,806,594,000.00	21,791,976,977.00	99.93
Pengembalian Belanja		-370,425.00	0.00
Total Belanja	21,806,594,000.00	21,791,606,552.00	99.93

Dibandingkan dengan Tahun 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan sebesar -29.00% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

Pembangunan konstruksi dan struktur utama gedung kantor pelayanan karantina telah terealisasi pada TA 2019. Pagu modal dan realisasi untuk pengembangan gedung kantor pelayanan karantina TA 2020 lebih kecil dibanding TA 2019

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	.%
Belanja Pegawai	7,989,356,480.00	7,743,032,097.00	3.18
Belanja Barang	9,501,511,072.00	10,518,458,580.00	-9.67
Belanja Modal	4,300,739,000.00	12,430,294,290.00	-65.40
Total Belanja	21,791,606,552.00	30,691,784,967.00	-29.00

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7,989,356,480.00 dan Rp7,743,032,097.00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 3.18% dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Kenaikan jumlah pegawai mutasi masuk 3 orang pegawai dan 1 orang CPNS
2. Kenaikan pangkat 11 orang pegawai
3. Kenaikan Gaji Berkala 35 orang pegawai

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	7,826,959,905.00	7,418,066,889.00	5.51
Belanja Lembur	162,767,000.00	324,972,000.00	-49.91
Jumlah Belanja Kotor	7,989,726,905.00	7,743,038,889.00	3.19
Pengembalian Belanja Pegawai	-370,425.00	-6,792.00	5,353
Jumlah Belanja	7,989,356,480.00	7,743,032,097.00	3.18

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp9,501,511,072.00 dan Rp10,518,458,580.00. Realisasi belanja barang TA 2020 mengalami penurunan sebesar -9.67% dari TA 2019. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya perjalanan dinas dilakukan secara daring seperti sosialisasi, seminar, rapat koordinasi, dll

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	2,188,990,345.00	2,065,436,646.00	5.98
Belanja Barang Non Operasional	514,073,035.00	598,695,120.00	-14.13
Belanja Barang Persediaan	643,295,250.00	824,336,600.00	-21.96
Belanja Jasa	1,589,948,665.00	1,427,910,000.00	11.35
Belanja Pemeliharaan	1,429,798,472.00	1,279,919,979.00	11.71
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3,135,405,305.00	4,322,160,235.00	-27.46
Jumlah Belanja Kotor	9,501,511,072.00	10,518,458,580.00	-9.67
Pengembalian Belanja Barang	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	9,501,511,072.00	10,518,458,580.00	-9.67

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4,300,739,000.00 dan Rp12,430,294,290.00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar -65.40% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja modal gedung bangunan untuk gedung kantor pelayanan karantina untuk pekerjaan struktur gedung utama telah terealisasi pada Tahun Anggaran 2019

Perbandingan Belanja Modal
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,089,650,000.00	993,350,000.00	9.69
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,211,089,000.00	11,436,944,290.00	-71.92
Jumlah Belanja Kotor	4,300,739,000.00	12,430,294,290.00	-65.40

Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	4,300,739,000.00	12,430,294,290.00	-65.40

B.5.1. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1,089,650,000.00 dan Rp993,350,000.00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 9.69% dibandingkan TA 2019. Terdapat kenaikan yang tidak signifikan karena belanja modal peralatan mesin sudah cukup memadai untuk mendukung operasional kantor.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,089,650,000.00	993,350,000.00	9.69
Jumlah Belanja Kotor	1,089,650,000.00	993,350,000.00	9.69
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	1,089,650,000.00	993,350,000.00	9.69

B.5.2. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3,211,089,000.00 dan Rp11,436,944,290.00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 mengalami penurunan sebesar -71.92% dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan pekerjaan struktur utama gedung bangunan telah terealisasi pada TA 2019 dengan rincian sbb :

1. Pembayaran belanja Modal berupa Uang Muka Kerja sebesar 20 % , Termin I, II, III, IV, dan Retensi 5% Pekerjaan Pengembangan Gedung Kantor Pelayanan Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2020 sesuai kontrak Nomor : 2991/PL.020/K.12.B/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 BAP Nomor : 3088/PL.020/K.12.B/06/2020
2. Pembayaran Konsultan Pengawas, Pengawas Internal dan Honor Pelaksana Bantuan Teknis Instansi terkait
3. Pekerjaan Jasa Penyusunan dokumen dan administrasi analisa dampak lalu lintas
4. Pembayaran Belanja Modal perjalanan konsultasi pusat dalam rangka untuk pembangunan gedung kantor pelayanan karantina

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,211,089,000.00	11,436,944,290.00	-71.92
Jumlah Belanja Kotor	3,211,089,000.00	11,436,944,290.00	-71.92
Pengembalian Belanja	0.00	0.00	0.00
Jumlah Belanja	3,211,089,000.00	11,436,944,290.00	-71.92

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp669,000.00. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.00	669,000.00
Jumlah	0.00	669,000.00

C.1.2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp-3,345.00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Bukan Pajak
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Kualitas Piutang	Nilai Piutang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	0,00	0,5%	3,345.00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00

C.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp764,009,780.00 dan Rp742,947,884.00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	764,009,780.00	742,947,884.00
Jumlah	764,009,780.00	742,947,884.00

Rincian Persediaan per 31 Desember 2020

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019	742,947,884.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	643,295,250.00
Transfer Masuk	52,427,500.00
Koreksi Penyesuaian Persediaan	4,197,696.00
Jumlah	1,442,868,330.00
Mutasi Kurang	
Pemakaian	674,417,550.00
Barang Rusak Usang	4,441.000.00
Jumlah	678,858,550.00
Saldo Persediaan per 31 Desember 2020	764,009,780.00

Nilai Aset Tetap

Rincian persediaan

Pembelian sebesar Rp.643,295,250,00 berupa ATK

Transfer masuk sertifikat KH dan KT dari Sekretariat Badan Karantina Pertanian sebesar Rp. 52,427,500.00

Koreksi nilai penyesuaian persediaan sebesar Rp. 4,197,696.00

Pemakaian persediaan untuk keperluan kantor sebesar Rp.674,417,550.00

Barang rusak usang persediaan barang barang persediaan yg rusak sebesar Rp. 4,441.000,-

C.1.4 Tanah

Aset berupa Tanah yang dimiliki Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp51,051,513,680.00 dan Rp51,051,513,680.00.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp8,953,784,309.00 dan Rp10,599,419,172.00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	10,599,419,172.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	1,020,900,000.00
Transfer Masuk	39,244,000.00
Pengembangan Nilai Aset	68,750,000.00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-2,774,528,863.00
Saldo per 31 Desember 2020	8,953,784,309.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-5,598,226,715.00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	3,355,557,594.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

Mutasi Tambah sebesar Rp. 1,020,900,000.00,- sbb :

Pembelian

1. Uninterruptible Power Supply (UPS) 7 Unit Rp10.150.000,00
2. Uninterruptible Power Supply (UPS) 1 Unit Rp13.800.000,00
3. PC Unit 13 Unit Rp. 156.950.000,00
4. Lap Top 6 Unit Rp. 78.800.000,00
5. Server 1 Unit Rp.85.500.000,00
6. Rak Server 1 Unit Rp.9.950.000,00
7. Mobil Fortuner 1 Unit Rp. 468.000.000,00
8. Sepeda Motor Yamaha Lexi 3 Unit Rp. 63.000.000,00
9. Meja Resepsionis Rp.134.750.000,00

Transfer Masuk dari BBKP Priok

- Lap Top 2 Unit Rp. 39.244.000,00

Pengembangan Nilai Aset 1 set camera mikroskop Rp.68.750.000,00

Mutasi Kurang

1. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya / penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp. -2,774,528,863.00

2. Penyusutan reguler semester II TA 2020 pada peralatan mesin yang dilakukan oleh sistem Aplikasi BMN Rp. -5,294,611,857.00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp25,427,458,473.00 dan Rp22,354,734,475.00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	22,354,734,475.00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	3,211,089,000.00
Mutasi Kurang	
Koreksi Kesalahan input IP	-42,401,000.00
Saldo per 31 Desember 2020	25,427,458,473.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-1,734,245,866.00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	23,693,212,607.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

Mutasi tambah pengembangan gedung melalui KDP

Pembayaran belanja Modal berupa Uang Muka Kerja sebesar 20 % , Termin I, II, III, IV, dan Retensi 5% Pekerjaan Pengembangan Gedung Kantor Pelayanan Karantina Pertanian Tahun Anggaran 2020 sesuai kontrak Nomor : 2991/PL.020/K.12.B/06/2020 tanggal 10 Juni 2020 BAP Nomor : 3088/PL.020/K.12.B/06/2020

Mutasi Kurang berasal dari revaluasi aset berdasarkan BAR-0907/REV/WKN.09/KPKNL.01/2020

Penyusutan reguler semester II TA 2020 pada peralatan mesin yang dilakukan oleh sistem Aplikasi BMN Rp. -1,437,015,756.00

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp5,050,000.00. Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	5,050,000.00
Mutasi Tambah	
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	5,050,000.00

Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-10,100,000.00
Saldo per 31 Desember 2020	0.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0.00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	0.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah berupa:

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0.00 dan Rp45,954,000.00. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	45,954,000.00
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-45,954,000.00
Saldo per 31 Desember 2020	0.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	0.00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	0.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya adalah berupa:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa monografi, atlas dan globe sebesar Rp. 45.954.000,-

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-7,332,472,581.00 dan Rp-8,665,931,532.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	8,953,784,309.00	-5,598,226,715.00	3,355,557,594.00

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
2.	Gedung dan Bangunan	25,427,458,473.00	-1,734,245,866.00	23,693,212,607.00
Akumulasi Penyusutan		34,381,242,782.00	-7,332,472,581.00	27,048,770,201.00

C.3. ASET LAINNYA

C.3.1. Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2,358,158,363.00 dan Rp0.00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	0.00
Mutasi Tambah	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	2,830,582,863.00
Mutasi Kurang	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	-5,050,000.00
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	-467,374,500.00
Saldo per 31 Desember 2020	2,358,158,363.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	-2,306,001,083.00
Nilai Buku per 31 Desember 2020	52,157,280.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain adalah berupa:

Mutasi Tambah

Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya karena kondisi barang telah rusak dan tidak lagi digunakan untuk operasional dan dalam proses penghapusan sebesar Rp. 2,830,582,863.00

Mutasi Kurang

Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) sesuai dengan surat no. 8593/PL.330?K.12.B/11/2020 tentang Permohonan Usul Penerbitan SK Penghapusan tanggal 9 Nopember 2020 sebesar Rp. 467,374,500.00

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020 adalah penyusutan reguler oleh aplikasi SIMAK BMN sebesar Rp. 2,306,001,083.00

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-2,306,001,083.00 dan Rp0.00.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Aset Lain-lain	2,358,158,363.00	-2,306,001,083.00	52,157,280.00
Akumulasi Penyusutan		2,358,158,363.00	-2,306,001,083.00	52,157,280.00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp61,354,477.00 dan Rp53,826,407.00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai karantina Pertanian Kelas I Semarang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	61,354,477.00	53,826,407.00
Jumlah	61,354,477.00	53,826,407.00

C.5. EKUITAS

C.5.1. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp79,455,941,432.00 dan Rp76,080,526,927.00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp11,723,503,637.00 dan Rp13,715,168,641.00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBP Lainnya
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	10,280,293,637.00	11,228,578,641.00	-8.45
Pendapatan Jasa Lainnya	1,443,210,000.00	2,486,590,000.00	-41.96
Jumlah	11,723,503,637.00	13,715,168,641.00	-14.52

Terjadi penurunan PNBP per 30 September 2020 sebesar -14,52% karena berkurangnya kegiatan pemeriksaan jasa karantina pada komoditi ekspor maupun impor sebagai dampak pandemi covid 19

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7,989,356,480.00 dan Rp7,742,644,217.00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	5,345,814,500.00	5,089,098,400.00	5.04
Beban Pembulatan Gaji PNS	79,588.00	74,236.00	7.21
Beban Tunj. Anak PNS	122,632,824.00	115,471,656.00	6.20
Beban Tunj. Beras PNS	284,393,340.00	272,980,840.00	4.18
Beban Tunj. Fungsional PNS	687,240,000.00	665,430,000.00	3.28
Beban Tunj. PPh PNS	12,184,178.00	11,634,335.00	4.73
Beban Tunj. Struktural PNS	47,880,000.00	47,880,000.00	0.00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	408,957,050.00	393,302,750.00	3.98
Beban Tunjangan Umum PNS	93,605,000.00	91,950,000.00	1.80
Beban Uang Lembur	162,767,000.00	324,972,000.00	-49.91
Beban Uang Makan PNS	823,803,000.00	729,850,000.00	12.87
Jumlah	7,989,356,480.00	7,742,644,217.00	3.19

Terjadi kenaikan sebesar 3,19 % pada beban gaji pokok dan tunjangan pegawai per 30 September TA 2020 karena bertambahnya jumlah pegawai mutasi masuk dari UPT lain

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp674,417,550.00 dan Rp566,989,350.00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	674,417,550.00	566,989,350.00	18.95
Jumlah	674,417,550.00	566,989,350.00	18.95

Terjadi peningkatan sebesar 18,95% karena belanja ATK, bahan cetakan, dll digunakan untuk stok

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4,295,389,115.00 dan Rp4,110,164,433.00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Bahan	514,073,035.00	593,160,120.00	-13.33
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	261,351,500.00	0.00	0.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	279,200,000.00	285,390,000.00	-2.17
Beban Honor Output Kegiatan	0.00	5,535,000.00	-100.00
Beban Jasa Lainnya	520,657,050.00	215,227,850.00	141.91
Beban Jasa Profesi	146,200,000.00	244,500,000.00	-40.20
Beban Keperluan Perkantoran	1,408,260,335.00	1,464,158,526.00	-3.82
Beban Langganan Air	120,669,600.00	97,420,599.00	18.58
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	256,421,271.00	159,227,354.00	61.04
Beban Langganan Listrik	432,720,607.00	383,550,725.00	12.82
Beban Langganan Telepon	6,971,644.00	28,007,303.00	-75.11
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	234,577,010.00	303,537,000.00	-22.72
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,601,500.00	12,351,120.00	-54.65
Beban Sewa	113,836,563.00	318,098,836.00	-64.21
Jumlah	4,300,540,115.00	4,110,164,433.00	4.51

Terjadi peningkatan sebesar 4,51% dibanding tahun sebelumnya karena beban dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 terealisasi sebesar Rp261,351,500.00 berupa pengadaan APD face shield, Masker, hand sanitizier, dll, Jasa Lainnya internet, pembayaran jasa langganan listrik di unit gedung baru kantor pelayanan Sudirman.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1,429,798,472.00 dan Rp1,279,919,979.00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	308,791,300.00	143,829,000.00	114.69
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	229,968,000.00	199,300,000.00	15.39
Beban Pemeliharaan Jaringan	19,997,500.00	49,977,790.00	-59.99
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	871,041,672.00	886,813,189.00	-1.78
Jumlah	1,429,798,472.00	1,279,919,979.00	11.71

Terjadi peningkatan beban pemeliharaan sebesar 11,71% karena pemeliharaan gedung dan Bangunan Lainnya berupa dinding treatment papan informasi, pengecatan dan perbaikan plafond lantai 2, perbaikan pagar instalasi karantina hewan, Pengecatan 88 m2 dan Perbaikan Pantry 16.25 m2 wilker tegal dan pemeliharaan peralatan mesin

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3,135,405,305.00 dan Rp4,322,160,235.00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1,354,032,987.00	1,344,325,034.00	0.72
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	135,390,000.00	0.00	0.00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	71,400,000.00	67,674,000.00	5.51
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	114,290,000.00	96,830,000.00	18.03
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	230,672,318.00	804,741,201.00	-71.34
Beban Perjalanan Tetap	1,229,620,000.00	2,008,590,000.00	-38.78
Jumlah	3,135,405,305.00	4,322,160,235.00	-27.46

Terdapat beban perjalanan dinas – penanganan pandemi covid 19 terealisasi sebesar Rp135,390,000.00 yaitu biaya perjalanan transportasi ke kantor BKP Kelas

I Semarang untuk melaksanakan WFO pegawai dalam rangka pandemi covid 19, Namun secara umum terjadi penurunan perjalanan dinas meting luar kota maupun dalam kota sebesar 27,46% karena pelaksanaan meting/rapat secara daring dalam masa pandemi covid-19

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp874,668,101.00 dan Rp1,201,377,416.00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	636,376,069.00	490,968,936.00	29.62
Beban Penyusutan Jaringan	162,083.00	330,332.00	-50.93
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,479,853.00	0.00	0.00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	837,495,064.00	710,078,148.00	17.94
Jumlah	1,475,513,069.00	1,201,377,416.00	22.82

Terdapat penurunan beban penyusutan karena proses rekalsifikasi aset bmn yang sudah rusak namun masih dalam proses penghapusan

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-3,345.00 dan Rp2,185.00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Penyisihan Piutang PNBP	-3,345.00	2,185.00	-253.09
Jumlah	-3,345.00	2,185.00	-253.09

Terdapat penurunan beban penyisihan piutang sebesar 253,09% atas resiko tidak tertagihnya PNBP per 31 Desember 2020

D.9. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian	Realisasi 31 Desember 2020	Realisasi 31 Desember 2019	Naik (Turun) %
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0.00	-2,221,257.00	-100.00
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-5,907,604.00	-3,244,190.00	82.10
Beban Persediaan Rusak/Usang	-4,441,000.00	-51,531,425.00	-91.38
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	10,105,300.00	13,217,950.00	-23.55
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	107,757,333.00	92,300,875.00	16.75
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0.00	834.00	-100.00
Jumlah	107,514,029.00	48,522,787.00	121.57

Terdapat peningkatan surplus kegiatan non operasional sebesar 121,57% karena terdapat pendapatan penjualan peralatan dan mesin yg lebih besar dibanding realisasi tahun sebelumnya berupa penghapusan 2 unit mobil dan 13 unit sepeda motor

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp76,080,526,927.00 dan Rp64,600,219,122.00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp-7,174,009,980.00 dan Rp-5,459,566,387.00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-97,863,065.00 dan Rp0.00.

E.3.1. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-42,401,000.00 dan Rp0.00. Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap per 31 Desember 2020.

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Gedung dan Bangunan	-42,401,000.00
Jumlah	-42,401,000.00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap yang dilakukan oleh KPKNL Semarang

E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp-55,462,065.00 dan Rp0.00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	3,120,673.00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	40,535,847.00
Akumulasi Penyusutan Jaringan	-3,154,583.00
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	-5,050,000.00
Gedung dan Bangunan	-95,964,002.00
Jaringan	5,050,000.00
Jumlah	-55,462,065.00

Terdapat koreksi aset tetap non revaluasi sebesar Rp-55,462,065.00, karena hibah gedung dan bangunan berdasarkan naskah hibah berdasarkan Naskah Hibah antara Kementerian Pertanian dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10278/PL.130/K/04/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Hibah Barang Milik Negara Tipe D Golongan I dan Rumah Negara Tipe E Golongan I pada Kementerian Pertanian Cq. Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang dan Berita Acara Serah Terima barang No.BAST 10277/PL.130/K/04/2019 tanggal 24 April 2019. Sebesar Rp.95,964,002.00 tersapat koreksi lainnya oleh aplikasi Simak BMN seperti akumulasi penyusutan jaringan, akumulasi aset tetap yg tidak digunakan, penyusutan gedung

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp10,046,442,582.00 dan Rp16,939,874,192.00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2020.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2020
Ditagihkan ke Entitas Lain	21,791,606,552.00
Diterima dari Entitas Lain	-11,831,929,970.00
Transfer Masuk	86,766,000.00
Jumlah	10,046,442,582.00

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2020 saldo DDEL adalah sebesar Rp-11,831,929,970.00 sedangkan DKEL sebesar Rp21,791,606,552.00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp86,766,000.00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2020.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	39,244,000.00
2.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok	-4,905,500.00
3.	Barang Konsumsi	Sekretariat Badan Karantina Pertanian	52,427,500.00
Jumlah			86,766,000.00

Transfer masuk Peralatan Mesin berupa 2 unit Laptop dari BBKP Tanjung Priok sebesar Rp.39.244.000,- dan Sertifikat KH dan KT dari sekretariat Badan Karantina Pertanian sebesar Rp.52,427.500,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp79,455,941,432.00 dan Rp76,080,526,927.00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

-

F.2. Pengungkapan Lain-lain

- Terdapat revisi DIPA antara lain :
 - Revisi 1) Revisi POK dan perubahan KPA Ir. Parlin Robert Sitanggang menggantikan drh. Wawan Sutian, Msi. per Oktober 2020 berdasarkan SK Mentan No.709/KPTS/KP.230/A/10/2020 tanggal 10 oktober 2020. Revisi 2) Revisi penghematan pagu anggaran Badan Karantina Pertanian tahap 1. Revisi 3) Revisi POK satker dalam rangka penyesuaian kegiatan dan anggaran terkait penanganan pandemic covid-19, Revisi 4) Revisi penghematan pagu anggaran Badan Karantina Pertanian tahap 2, 5) Revisi penambahan pagu PNBPN, 6) Revisi halaman III DIPA penyesuaian penarikan dana dan realisasi, 7) Penghematan tahap III refocusing Badan Karantina Pertanian Eselon 1, 8) Revisi Halaman III DIPA penyesuaian penarikan dana dan realisasi.
- Terdapat belanja barang operasional sebesar Rp.261,351,500.00 dan perjalanan dinas sebesar Rp135,390,000.00 terkait Penanganan Pandemi COVID-19 yg antara lain Hand Sanitizer, Face Shield, masker, dll yang bersumber pada DIPA Tahun Anggaran 2020